

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PASAR MODAL

Sultan Syahril A.Kh

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. GARAM (PERSERO) ATAS IMPOR GARAM.

Rizal Choirul Romadhan

KEABSAHAN IKATAN JUAL BELI YANG DIDASARI AKTA KUASA MENJUAL HARTA BERSAMA YANG DITANDATANGANI TIDAK DIHADAPAN NOTARIS DAN DILUAR WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2019/PN.SDA JUNCTO PUTUSAN NOMOR 131/PDT/2020/PT.SBY)

Ivan Lukito Setiawan, Erwin Lukito Setiawan, Dan Kevin Wibowo

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NO. 119/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PBR. TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEGAWAI DAN PT. MALINDO KARYA LESTARI

Nabil Mahribetty Kurnia Rahayu, Mochamad Jazri Aditiya Pranata, Dan Oktafredianus Dede Lisiansu

EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM STUDI KASUS PUTUSAN PA PEMATANG SIANTAR NO 0030/PDT.G/2015/PA.PST

Betty Kurnia Rahayu

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN KEDUA BELAH PIHAK DI JALAN RAYA

Gito Sutriyo

DAMPAK RIIL DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Michelle Koesoema, Richard Surya, Nathania Allisya Krisira, Hidayat Indra Listiono, Dan Johanna Zaneta

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM STUDI
KASUS PUTUSAN PA PEMATANG SIANTAR NOMOR
0030/PDT.G/2015/PA.PST**

Betty Kurnia Rahayu
Program Studi/Jurusan Hukum
Universitas Narotama
Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo Surabaya (60117)
betty12111998@gmail.com

ABSTRACT

Examination of decisions is a process of examination, so examination of judicial decisions can be interpreted as examining court decisions and judges whose task is to try a case. In this case, it concerns the distribution of joint assets in a divorce case in which the joint assets are controlled by one of the parties who is now called the defendant. Joint assets have been regulated in Article 35 of the Marriage Law, known as joint assets. And article 53 of the Marriage Law is a method of dividing property in a marriage. The distribution of joint assets according to the Islamic Law Compilation must be divided equally between the two or ½ part for each husband and wife. Therefore, the judge decided several points for married couples in judging in order to carry out justice

Keywords: *Employment Relations Decision, Decidendi Ratio*

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan yang menguji sebuah putusan ini mulai dikenal di negara Indonesia dengan istilah “Eksaminasi Putusan”. Melalui upaya pengujian putusan ini dalam perspektif hukum merupakan salah satu solusi dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah Agung yang memiliki fungsi dan kewajiban pemberi keadilan (justice dispenser function) kepada masyarakat dan sebagai representasi negara dalam memberikan keadilan.¹ Kemudian mengeluarkan Surat

¹ Binsar Gultom, Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, Suara Pembaharuan, 2006.

Edaran/Intruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, Daftar Banding dan lain lain.²

Dalam kasus PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Pst menjelaskan mengenai harta bersama dan juga pembagian harta setelah bercerai berupa tanah beserta bangunan, serta harta benda lainnya. Telah diketahui bahwa setelah bercerai mengenai harta gono gini yang status pembagiannya belum jelas, maka penggugat menggugat untuk membagi harta bersama. Namun karena tergugat sulit untuk menerima permintaan penggugat maka Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan kasus tersebut yang mana hasil putusannya adalah pembagian sama rata harta tersebut dan juga menetapkan hutang sebagai hutang bersama antara penggugat dan tergugat. Permasalahan hukum dalam penulisan penelitian ini dibatasi pada Apa Ratio Decidenti Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST? Apakah Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

PEMBAHASAN

Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Examination atau dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan semua hal mengenai peradilan berarti ujian atau proses pemeriksaan terhadap suatu putusan pengadilan atau semua yang terlibat dalam peradilan misalnya hakim dan jaksa. Istilah eksaminasi ini bisa juga disebut sebagai suatu proses pemeriksaan. Jadi eksaminasi putusan peradilan dapat diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan-putusan pengadilan dan juga hakim yang tugasnya mengadili suatu perkara. Istilah lain yang hampir sama dengan eksaminasi disebut legal annotation, yaitu semacam pemberian catatan terhadap suatu putusan pengadilan. Dengan adanya keberadaan badan eksaminasi publik kini memberikan kontribusi yang sangat drastis dengan usaha MA untuk

² H.M. Laica Marzuki, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik*, Workshop Monitoring Peradilan, ICW, Jakarta, 2002, hal. 2.

melakukan proses pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh hakim mengenai fungsinya dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967 yang telah dikenal dengan istilah eksaminasi internal badan peradilan untuk mengkaji suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang dapat di eksaminasi ada dua: yang pertama dinilai sangat kontroversional.³Penilaian yang kontroversial dapat dilihat melalui penerapan hukum acaranya atau penerapan hukum materiilnya yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat yang banyak ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proses peradilan pada kasus tersebut. Kedua, berpengaruh terhadap dampak sosial yang tinggi. Kasus tersebut memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan eksaminasi secara luas adalah melakukan suatu kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan asumsi yang kuat karena banyak produk peradilan yang dinilai menyimpang baik secara materiil maupun formil. Kemudian karena hal itulah Eksaminasi atau pengujian putusan oleh masyarakat (eksaminasi publik) perlu dilakukan untuk memberikan keadilan di masyarakat. Eksaminasi ada karena untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kemampuan teoritis bagi para hakim yang berperan aktif dalam proses peradilan, baik mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta kemampuan untuk menerapkan azas-azas hukum yang berlaku, karena dari dieksaminasi suatu putusan pengadilan tersebut, maka akan terungkap juga hasil kinerja semua badan penegak hukum baik jaksa/penuntut umum dalam bentuk Surat Dakwaan (dalam perkara pidana) yang harus termuat dalam putusan, dengan begitu makna serta manfaat eksaminasi secara substantive adalah perbaikan kinerja semua aparat penegak hukum.

³ https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_1_tahun_1967.pdf

Eksaminasi sebuah putusan pada dasarnya menilai atas semua unsur/lembaga yang terlibat dalam proses peradilan.⁴ Dalam sebuah putusan perdata misalnya menilai kinerja seorang hakim selaku pemberi keputusan peradilan, Jaksa sebagai pejabat penuntut umum, dan secara tidak langsung aparat penyidik. Terlebih lagi jika Eksaminasi dilakukan oleh pihak eksternal maka dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam serta mengawasi jalannya suatu proses peradilan mulai dari proses awal penyidikan sampai dengan perkara di putus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian penegakkan hukum menjadi lebih tertib dan berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat. Terlebih jika masyarakat yang giat menegakkan keadilan antar sesama. Bagi masyarakat akademisi khususnya Fakultas Hukum eksaminasi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta bahan diskusi dan bahkan dunia akademis lainnya.

Eksaminasi putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST. diawali dari Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 30/ Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 22 Januari 2015. Dalil Gugatan berdasar pada bahwa setelah perkawinan antara Penggugat putus oleh perceraian tersebut Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut kepada Tergugat dimana Penggugat meminta agar sebagian dari tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat, dan seluruh penghasilan dari tanah dan rumah tetap dikuasai oleh Penggugat sehingga terpaksa seorang Penggugat harus mengajukan suatu gugatan mengenai bagaimana baiknya pembagian harta gono gini yang ada dalam perkara ini ke Pengadilan.

⁴ Eksaminasi putusan peradilan.pdf hal 6

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai tanah beserta rumah yang sedang menjadi perkara yang bukan hanya miliknya akan tetapi juga milik Penggugat yang merupakan harta bersama/harta gono gini dari Penggugat dan Tergugat sedangkan hasil yang diperoleh dari harta antara suami dan istri tersebut tidak pernah dibagi oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan dan oleh karenanya maka perbuatan Tergugat baik surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atas tanah beserta rumah yang sedang menjadi perkara tanpa membicarakan dengan pihak penggugat kemudian harus membatalkan hak yang diberikan kepada selain penggugat demi terciptanya hukum atau harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena Tergugat kemungkinan tidak mau membagi dan menjalankan isi putusan Pengadilan nantinya, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan pelelangan atas tanah beserta dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut dan uang hasil pelelangan tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara harus dibagi sama rata antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Bahwa oleh karena surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat setelah perkawinan putus adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat atas tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal (nietig) atau setidaknya harus dibatalkan (vernietig) karena tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Pada kasus ini harta masing-masing sebelum menikah tidak dijelaskan secara rinci pada putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST. akan tetapi yang menjadi duduk perkara adalah mengenai harta bersama, maka dari itu hakim memutuskan dalam putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST Menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan D Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :- sebelah Utara : dengan tanah AS;- sebelah Selatan : dengan tanah MS;

- sebelah Timur : engan tanah kosong; - sebelah Barat : dengan Jalan Umum, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam putusnya pengadilan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas; Menetapkan sisa hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia cabang Pematangsiantar sejumlah Rp197.903.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sebagai hutang bersama; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut dalam dictum 4 diatas masing-masing separuhnya; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang, melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah menyelesaikan pembayaran hutang Bersama.

Berdasarkan putusan hakim pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST merupakan permasalahan pembagian harta bersama setelah perceraian. Permasalahan tersebut di Indonesia telah diatur, membagi harta gono gini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta gono-gini antara suami beserta istri. Namun, pada penerapannya seorang hakim tidak selalu membagikan harta bersama secara adil atau sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pembagian harta bersama juga harus memperhatikan keadaan antara suami istri apakah ada alasan lain yang mengakibatkan pembagian tersebut tidak sama rata sesuai perundang-undangan. misalnya, seorang istri lebih kerja keras dan menghasilkan kekayaan lebih banyak dan terjadi perceraian karena adanya KDRT yang dilakukan oleh seorang suami. Maka pembagian harta bersama tersebut lebih banyak diterima oleh istri, bahwa sebenarnya adil tidak hanya tentang sama rata, tetapi mengenai keadilan itu sendiri.

Sebagaimana tugas seorang hakim adalah memutus perkara seadil-adilnya, maka dalam hal itu keyakinan hakim sangat dibutuhkan dan didukung dengan adanya alat bukti yang ada. Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHPer dan peraturan perundang-undang yang ada di negara tersebut dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.

Bahwa sistem mengajukan perkara membagi harta kekayaan bersama atau harta gono gini begitu sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, khususnya yang menentukan bahwa perkara pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ketika akan cerai atau gugatan cerai ternyata lebih efektif praktis bagi penggugat serta lebih mempercepat proses penyelesaian perkara. Karena satu kali mengajukan perkara dua hal secara sekaligus dapat terselesaikan terlebih lagi dalam sistem ini ada satu kelebihan yaitu lebih banyak dimungkinkan terjadinya perdamaian antar kedua belah pihak pengkuat dan tergugat. Karena antara keduanya pada waktu pemeriksaan berlangsung kedudukan masih tetap terikat sebagai suami istri sah. Oleh karenanya penulis berharap agar sistem mengajukan perkara pembagian harta gono gini tersebut di atas diterapkan pada Pengadilan Agama.

Pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST, hakim telah menetapkan bahwa: 1. Mengabulkan berbagai gugatan yang telah dituliskan oleh Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan D Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut : - sebelah Utara berbatasan dengan tanah AS;- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MS;- sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. 3. Menetapkan pembagian harta antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing sebesar setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas; 4. Menetapkan sisa hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia cabang Pematangsiantar sejumlah Rp197.903.000,- sebagai

hutang bersama; 5. Menghukum keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melaksanakan yang menjadi kewajiban bersama yaitu membagi harta kekayaan yang didapatkan bersama sesuai dengan diktum angka 2 di atas. 6. Dengan bagian yang telah dijelaskan seperti diktum angka 3 di atas secara natura, jika pembagian itu tidak diselesaikan secara natura, maka penyelesaiannya adalah melalui pelelangan, dan dibantu oleh Kantor Lelang Negara dan uangnya diserahkan kepada keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai dengan perjanjian pembagian diatas setelah melakukan pelunasan pembayaran hutang keduanya; Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang, melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah menyelesaikan pembayaran hutang bersama;

Berdasarkan putusan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, harta dan hutang bersama tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam penyelesaiannya, maka keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles keadilan adalah bentuk dari ketaatan hukum baik lisan maupun tertulis telah dilakukan oleh seorang hakim dalam mengadili perkara ini, sehingga keadilan masyarakat telah tercipta.

PENUTUP

Berikut adalah ratio decidendi dari putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST Bahwa bahwa terhadap harta bersama yang telah disebutkan Penggugat pada point 3 pada dalil gugatannya telah menjadi agunan KPR yang telah diagunkan bersama-sama Penggugat dan Tergugat pada B** CABANG PEMATANGSIANTANG. Bahwa agunan KPR terhadap harta keduanya disebut sebagai harta bersama tersebut akan berakhir pada tahun 2027 dan baru berlangsung selama 54 bulan (4.6 tahun); Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak; B** CABANG

PEMATANGSIANTAR Pematangsiantar sebagai pihak yang juga harus digugat dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung No.6** K/SIP/19** ternyata sebagian objek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi telah menjadi hak milik yaitu pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan kedua pasangan, maka dari itu karena pihak ketiga tersebut tidak digugat oleh penggugat, yang artinya pihak ketiga tidak ikut campur dalam permasalahan ini, gugatannya dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

Dari alasan-alasan putusan diatas dan hakim memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada dan terlampir dalam putusan tersebut. Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHPer dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim. Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST dirasa sudah sesuai dengan hukum Islam karena menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofisnya dengan perkara melihat pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi Nugroho, Susanti, *Sejarah Dan Pelaksanaan Eksaminasi Di Lingkungan Peradilan, Dalam Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003;
- Asrun, Muhammad - *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004;
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006;
- Rahardjo, Sajipto, *Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum Dalam Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta 2006.

Jurnal :

Jurnal-INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/872>

Syamsudin. 2010. Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22. Nomor 3.

Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding

Media Elektronik

<http://www.resources.unpad.ad.id> (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_1_tahun_1967.pdf

<http://artikelddk.com/pengertian-dan-tujuan-eksaminasi-putusan-pengadilan/>



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>